



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; dan
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi.

SURAT EDARAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional, maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menginisiasi pengembangan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). IPPN tersebut digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan

yang disusun oleh K/L/D sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Kementerian/Lembaga (K/L) perlu menyusun rencana yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menghindari terjadinya silo-silo sektoral perencanaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembangunan yang kontradiktif. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu diarahkan juga pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Walaupun perencanaan pembangunan daerah berjalan masing-masing namun arah tujuannya masih saling mendukung satu sama lain secara nasional.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana reformasi birokrasi ditetapkan sebagai pengarusutamaan yang wajib dilakukan oleh seluruh K/L/D, maka setiap K/L *leading sector* harus memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan/tema yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Guna mendukung sasaran program “Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel”, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas sebagai *leading sector* dalam perencanaan pembangunan nasional diminta untuk mengawal K/L/D untuk:

- a. memastikan perencanaan berbasis kinerja;
- b. memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional;
- c. menjamin keterhubungan tujuan, sasaran, dan program pembangunan antar berbagai sektor; dan
- d. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran (*e-planning* dan *e-budgeting*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi K/L/D dalam menyusun perencanaan pembangunannya dengan memperhatikan IPPN.

2. Tujuan:

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penjelasan kepada K/L/D mengenai muatan-muatan yang akan dinilai dalam IPPN; dan
- b. menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran kualitas perencanaan yang disusun oleh K/L/D.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini meliputi penilaian kebijakan atas dokumen-dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan oleh K/L/D:

1. Untuk Kementerian/Lembaga:
 - a. Rencana Strategis (Renstra) K/L;
 - b. Rencana Kerja (Renja) K/L; dan
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L.
2. Untuk Pemerintah Daerah:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
 - d. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

E. ISI EDARAN


1. Penilaian terhadap IPPN dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahun pada tahun berikutnya setelah dokumen perencanaan disusun.
2. Penilaian IPPN tidak dilakukan secara mandiri, namun dinilai langsung oleh Kementerian PPN/Bappenas.
3. Panduan mengenai penilaian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Edaran ini.
4. Hasil dari penilaian IPPN menjadi acuan untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan K/L/D.
5. Apabila diperlukan, Kementerian PPN/Bappenas dapat melakukan penyesuaian terhadap instrumen untuk melakukan penilaian terhadap IPPN K/L/D dan hasil penyesuaiannya akan disosialisasikan kembali sebelum dilakukan penilaiannya.

F. PENUTUP

1. Seluruh K/L/D dapat menggunakan Surat Edaran ini sebagai acuan dalam mengukur hasil kualitas perencanaan yang sudah disusun.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

Panduan Mengenai Metode, Instrumen, dan Tahapan Pengukuran
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

- A. Metode Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
1. Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran.
 2. Dikarenakan karakteristik dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian terhadap IPPN K/L/D dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda.
 3. Kerangka kerja dari penilaian IPPN untuk Kementerian/Lembaga (K/L) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Komponen Penilaian IPPN K/L

No.	Komponen	Sub-komponen	Dokumen yang dinilai
1.	Integrasi	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Renstra – RPJMN
		Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	Renstra – Renja
		Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	Renja – RKP

No.	Komponen	Sub-komponen	Dokumen yang dinilai
2.	Sinkronisasi	Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian <i>Output</i> Prioritas RKP pada tahun perencanaan	RKA – RKP
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	RKA – Renja
		Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian <i>Output</i> Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan	RKA – RKP
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RPJM – Renstra K/L

- a. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Komponen penilaian dari integrasi terdiri atas:
 - 1) Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;
 - 2) Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L;
 - 3) Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP; dan
 - 4) Kepatuhan terhadap PSN.
- b. Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai Rincian *Output* Prioritas yang ditetapkan dalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas dokumen perencanaan. Komponen penilaian dari sinkronisasi terdiri atas:
 - 1) Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian *Output* Prioritas RKP pada tahun perencanaan;

- 2) Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; dan
 - 3) Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian *Output* Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.
- c. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.
4. Kerangka kerja dari penilaian IPPN untuk Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Sub-komponen	Dokumen yang dinilai
1.	Sinergi	Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	RPJMD
		Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP	RKPD
		Kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah	
2.	Kualitas Perencanaan	Kesesuaian prioritas daerah dengan isu	
		Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah	
		Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek	

No.	Komponen	Sub-komponen	Dokumen yang dinilai
		untuk mencapai target dan sasaran	
		Inovasi perencanaan pembangunan	
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RKPD – Renstra OPD

- a. Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama. Komponen penilaian dari sinergi terdiri dari:
 - 1) Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN;
 - 2) Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP; dan
 - 3) Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap PN di Daerah.
- b. Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis – target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:
 - 1) Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah;
 - 2) Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah;
 - 3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran; dan

4) Inovasi perencanaan pembangunan.

- c. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

B. Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L)

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator		Definisi	Bobot	Strategi Penilaian	Kelengkapan Dokumen
1.	INTEGRASI	Integrasi mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat.	60	Penjumlahan atas indikator yang menaungi aspek integrasi	
a.	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen Renstra di masing-masing K/L dengan RPJMN	19	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	Mencantumkan buku/dokumen RENSTRA K/L untuk memastikan kesesuaian
	1) Pernyataan visi Renstra K/L selaras visi RPJMN	Substansi visi dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan substansi visi dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari <i>assessor</i> dan didukung oleh dokumen yang relevan.	2	Poin A = 2, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
	2) Pernyataan Misi dalam Renstra K/L memiliki keterkaitan dengan misi RPJMN	Substansi misi dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan substansi misi dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari <i>assessor</i> dan didukung oleh dokumen yang relevan.	2	Poin A = 2, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 1, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
	3) Tujuan dalam Renstra K/L selaras sasaran RPJMN	Substansi tujuan dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan substansi tujuan dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari <i>assessor</i> dan didukung oleh dokumen yang relevan.	3	Poin A = 3, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator			Definisi	Bobot	Strategi Penilaian	Kelengkapan Dokumen
					ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	
	4)	Sasaran Strategis Renstra K/L selaras strategi RPJMN	Substansi sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan substansi sasaran strategis dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari <i>assessor</i> dan didukung oleh dokumen yang relevan.	3	Poin A = 3, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
	5)	Arah kebijakan Renstra K/L selaras arah kebijakan RPJMN	Substansi arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan substansi arah kebijakan dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari <i>assessor</i> dan didukung oleh dokumen yang relevan.	3	Poin A = 3, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
	6)	Indikator kinerja sasaran Renstra K/L selaras indikator kinerja sasaran RPJMN	Substansi indikator kinerja sasaran dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan substansi indikator kinerja sasaran dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari <i>assessor</i> dan didukung oleh dokumen yang relevan.	3	Poin A = 3, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator		Definisi	Bobot	Strategi Penilaian	Kelengkapan Dokumen
	7) Target kinerja sasaran Renstra K/L selaras target kinerja sasaran RPJMN	Substansi target kinerja sasaran dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan substansi target kinerja sasaran dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	3	Poin A = 3, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
b.	KONSISTENSI RENJA K/L TERHADAP RENSTRA K/L	Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen Renja di masing-masing K/L dengan Renstra K/L dimaksud	13	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	Mencantumkan buku/dokumen RENJA K/L & RENSTRA untuk memastikan kesesuaian
	1) Sasaran strategi Renja K/L konsisten dengan Sasaran Strategis Renstra K/L	Jumlah dan substansi sasaran strategis dalam dokumen rencana kerja di masing-masing K/L sama dengan jumlah dan substansi sasaran strategis dalam Renstra K/L, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	6	Poin A = 6, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 3, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
	2) Indikator kinerja sasaran Renja K/L konsisten indikator kinerja sasaran Renstra K/L	Jumlah dan substansi indikator kinerja sasaran strategis dalam dokumen rencana kerja di masing-masing K/L sama dengan jumlah dan substansi indikator kinerja sasaran strategis dalam Renstra K/L, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	7	Poin A = 7, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 4, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator		Definisi	Bobot	Strategi Penilaian	Kelengkapan Dokumen
c.	KEPATUHAN RENJA K/L TERHADAP RKP	Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen Renja di masing-masing K/L dengan RKP	28	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	Mencantumkan buku/dokumen RENJA K/L & RKP untuk memastikan kesesuaian
	1) Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP	Jumlah dan substansi sasaran output prioritas dalam dokumen Rencana Kerja masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan jumlah dan substansi sasaran output proyek prioritas dalam dokumen major project RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	7	Poin A = 7, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 4, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
	2) Target Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP	Jumlah dan substansi target output prioritas dalam dokumen Rencana Kerja masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan jumlah dan substansi target output proyek prioritas dalam dokumen major project RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	7	Poin A = 7, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 4, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
	3) Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	Jumlah dan substansi sasaran output prioritas dalam dokumen Rencana Kerja masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan jumlah dan substansi sasaran output proyek prioritas dalam dokumen prioritas nasional RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	7	Poin A = 7, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 4, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator			Definisi	Bobot	Strategi Penilaian	Kelengkapan Dokumen
	4)	Target Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	Jumlah dan substansi target output prioritas dalam dokumen Rencana Kerja masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan jumlah dan substansi target output proyek prioritas dalam dokumen prioritas nasional RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	7	Poin A = 7, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 4, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban
2.	SINKRONISASI		Sinkronisasi mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai output prioritas yang ditetapkan dalam RKP serta mengukur kesesuaian pagu anggaran lintas dokumen perencanaan.	30	Penjumlahan atas indikator yang menaungi aspek sinkronisasi	
	a.	KEPATUHAN ANGGARAN K/L UNTUK MEMBIYAI OUTPUT PRIORITAS RKP PADA TAHUN PERENCANAAN	Pengukuran kesesuaian jumlah anggaran output prioritas yang ditetapkan oleh masing-masing K/L dalam berbagai dokumen perencanaan	10	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	Mencantumkan buku/dokumen RENJA K/L & RKA untuk memastikan kesesuaian
	1)	Keselaran anggaran output prioritas dalam RKA pada tahun perencanaan dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN dalam RKP	Jumlah anggaran output prioritas dalam dokumen RKA pada tahun perencanaan memiliki keselarasan dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN dalam dokumen RKP di masing-masing K/L, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	5	Poin A = 5, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban
	2)	Keselaran anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP pada tahun perencanaan dalam koridor sasaran sektor/bidang dalam RKP	Jumlah anggaran output prioritas dalam dokumen RKA pada tahun perencanaan memiliki keselarasan dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor sasaran sektor/bidang dalam dokumen RKP di masing-masing K/L, dibuktikan dengan argumentasi	5	Poin A = 5, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator			Definisi	Bobot	Strategi Penilaian	Kelengkapan Dokumen
			dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.		ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	
b.	KESESUAIAN PAGU ANGGARAN RKA DENGAN PAGU ANGGARAN RENJA K/L		Pengukuran kesesuaian jumlah pagu anggaran masing-masing K/L dalam berbagai dokumen perencanaan	10	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	Mencantumkan buku/dokumen RENJA K/L & RKA untuk memastikan kesesuaian
	1)	Total Pagu Anggaran pada RKA sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	Total pagu anggaran pada dokumen RKA di masing-masing K/L sesuai dengan total pagu anggaran dalam dokumen Renja masing-masing K/L Bagi K/L yang tidak mendukung PN, RKA sesuai dengan Renja K/L, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	10	Poin A = 10, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban
c.	KEPATUHAN ANGGARAN K/L UNTUK MEMBIAYAI OUTPUT PRIORITAS RKP PADA TAHUN PELAKSANAAN		Pengukuran kesesuaian jumlah anggaran output prioritas yang ditetapkan oleh masing-masing K/L dalam berbagai dokumen perencanaan	10	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	Mencantumkan buku/dokumen RENJA K/L & RKA untuk memastikan kesesuaian
	1)	Keselaran anggaran output prioritas dalam RKA pada tahun pelaksanaan dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN dalam RKP	Jumlah anggaran output prioritas dalam dokumen RKA pada tahun pelaksanaan memiliki keselarasan dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN dalam dokumen RKP di masing-masing K/L, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	5	Poin A = 5, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban
	2)	Keselaran anggaran output prioritas dalam RKA dengan output proyek prioritas RKP pada tahun	Jumlah anggaran output prioritas dalam dokumen RKA pada tahun pelaksanaan memiliki keselarasan dengan output proyek prioritas RKP dalam koridor	5	Poin A = 5, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi	Assessor menuliskan pernyataan dan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator			Definisi	Bobot	Strategi Penilaian	Kelengkapan Dokumen
		pelaksanaan dalam koridor sasaran sektor/bidang dalam RKP	sasaran sektor/bidang dalam dokumen RKP di masing-masing K/L, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.		Poin B = 2, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>argumentasi dalam mendukung jawaban</i>
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja		Mengukur keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja dilihat dari Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	10	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	
	a.	Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	Mengukur keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja dilihat dari Target dan Sasaran Prioritas Nasional di dalam RKP menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	10	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	
	1)	<i>Cascading</i> Target Pembangunan Nasional menjadi Target Kinerja Instansi Terkait	Mengukur Target dan Sasaran Prioritas Nasional yang menjadi Target Kinerja Instansi Terkait menggunakan metode <i>Cascading</i>	10	Penjumlahan atas sub-indikator yang menaungi indikator	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
	a)	Target dan sasaran prioritas nasional menjadi IKU instansi terkait	Mengukur/mengetahui jumlah target dan sasaran prioritas nasional yang menjadi IKU instansi yang mengampu sektor/bidang terkait	10	Poin A = 10, Jika K/L memenuhi ketentuan definisi secara menyeluruh Poin B = 5, Jika K/L memenuhi sebagian ketentuan definisi Poin C = 0, Jika K/L tidak memenuhi ketentuan definisi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>

2. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
1	SINERGI					32	Mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama	
	a.	Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN				9	Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	Mencantumkan buku/dokumen RPJMD untuk memastikan kesesuaian
		1)	Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN			2	Mengukur keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN, dengan menjumlahkan skor sub indikator	
		a)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan B. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN C. Di atas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	A = 0 B = 0,3 C = 0,5	0.50	Mengukur tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		b)	Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,5	0.50	Terdapat tabel yang menyandingkan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
				daerah RPJMD dengan PN RPJMN				assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	<i>serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
			c)	Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan B. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN C. Di atas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	A = 0 B = 0,3 C = 0,5	0.50	Mengukur tingkat keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN , dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
			d)	Tersedianya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,5	0.50	Terdapat tabel yang menyandingkan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah , dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
			2)	Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN			3	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN, dengan menjumlahkan skor sub indikator	
			a)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25%	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258	0.43	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
			Berkualitas) RPJMN sesuai kewenangan daerah	terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	D = 0,344 E = 0,43		dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	layar dan dokumen yang relevan
			B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN					
			C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN					
			D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan					

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN				
				b) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan daerah	<p>A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program</p>	<p>A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43</p>	0.43	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN				
			c)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25%	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258	0.43	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
				dan Berdaya Saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah	terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan	D = 0,344 E = 0,43		dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	layar dan dokumen yang relevan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN				
			d)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43	0.43	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN				
			e)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25%	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258	0.43	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
			Pelayanan Dasar) RPJMN sesuai kewenangan daerah	terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN	D = 0,344 E = 0,43		dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	layar dan dokumen yang relevan
			B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN					
			C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN					
			D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan					

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN				
			f)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN sesuai kewenangan daerah	<p>A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program</p>	<p>A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43</p>	0.43	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					<p>daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN</p>				
			g)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25%	<p>A = 0,086</p> <p>B = 0,172</p> <p>C = 0,258</p>	0.43	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
			Dan Transformasi Pelayanan Publik sesuai kewenangan daerah	<p>terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan</p>	<p>D = 0,344</p> <p>E = 0,43</p>		dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	<i>layar dan dokumen yang relevan</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN				
			3)	Indikator makro pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN:			1	Mengukur keselarasan antara indikator makro pada RPJMD dengan indikator makro pada RPJMN, dengan menjumlahkan skor sub indikator	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	A. Tidak Selaras B. Selaras	A = 0,25 B = 0,50	0.50	Target tingkat pengangguran terbuka pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN secara nilai, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tingkat Kemiskinan (%)	A. Tidak Selaras B. Selaras	A = 0,25 B = 0,50	0.50	Target tingkat kemiskinan pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN secara nilai, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
									layar dan dokumen yang relevan
			4)	Dokumen RPJMD selaras dengan Proyek Prioritas Strategis	A. Tidak B. Ya	A = 0,5 B = 1	1	Mengakomodir dan mendukung seluruh proyek prioritas strategis nasional dalam dokumen RPJMD, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			5)	Komponen SPM di RPJMD diselaraskan dengan komponen SPM Nasional	A. Tidak B. Ya	A = 0,5 B = 1	1	Mengakomodir seluruh indikator SPM sesuai perundang-undangan pada dokumen RPJMD, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			6)	Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM nasional	A. Tidak B. Ya	A = 0,5 B = 1	1	Menyesuaikan target indikator SPM sesuai target nasional, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	b.	Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP					13	Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RKPD dengan dokumen RKP	Mencantumkan Dokumen RKPD
		1)	Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan				2.50	Mengukur keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas	

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
				sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP				Nasional (PN) RKP, dengan menjumlahkan skor sub indikator	
			a)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keterkaitan B. Kurang dari 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP C. Di atas 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP	A = 0,1 B = 0,31 C = 0,625	0.625	indikator sasaran pembangunan daerah RKPD memiliki keterkaitan dengan sasaran PN RKP , dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,625	0.625	Terdapat tabel yang menyandingkan antara Sasaran Pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP , dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			c)	Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keselarasan B. Kurang dari 50% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP C. Di atas 50% prioritas program RKPD	A = 0,1 B = 0,31 C = 0,625	0.625	Mengukur tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP , dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					selaras dengan PN RKP				
			d)	Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,625	0.625	Terdapat tabel yang menyandingkan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan Daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	
			2)	Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP			1.50	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN 1, dengan menjumlahkan skor sub indikator	
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. =< 25 % B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0.75	Terdapat dukungan secara substansi program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,75	0.75	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			3)	Tersedianya dukungan program daerah RKPD			1.50	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPD terhadap	

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
				terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP			kegiatan prioritas pada PN 2, dengan menjumlahkan skor sub indikator	
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP sesuai dengan kewenangan daerah A. $\leq 25\%$ B. $25\% - 50\%$ C. $50\% - 75\%$ D. $\geq 75\%$	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75	Terdapat dukungan secara substansi program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			4)	Tersedianya dukungan program daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP		1.50	Terdapat dukungan program daerah RKP terhadap kegiatan prioritas pada PN 3, dengan menjumlahkan skor sub indikator	
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan A. $\leq 25\%$ B. $25\% - 50\%$ C. $50\% - 75\%$ D. $\geq 75\%$	A = 0,1875 B = 0,375 C =	0,75	Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP sesuai dengan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
				Berdaya Saing RKP sesuai dengan kewenangan daerah		0,5625 D = 0,75		kewenangan daerah dalam <i>range</i> (0-100%)	dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75	Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			5)	Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP			1.50	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP	
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. =< 25 % B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75	Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam <i>range</i> (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75	Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
									layar dan dokumen yang relevan
			6)	Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP			1.50	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP	
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. $\leq 25\%$ B. $25\% - 50\%$ C. $50\% - 75\%$ D. $\geq 75\%$	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75	Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75	Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			7)	Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP			1.50	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP	

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. $\leq 25\%$ B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. $\geq 75\%$	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75	Terdapat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP sesuai dengan kewenangan dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75	Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		8)		Indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator makro pada RKP			1.50	Mengukur keselarasan indikator makro RKPD terhadap indikator makro dalam RKP	
			a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	A. Tidak Selaras B. Selaras	A = 0,375 B = 0,75	0,75	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) di RKPD selaras dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) di RKP	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tingkat Kemiskinan (%)	A. Tidak Selaras B. Selaras	A = 0,375 B = 0,75	0,75	Tingkat Kemiskinan (%) di RKPD selaras dengan Tingkat Kemiskinan (%) di RKP	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
									<i>serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
		c.	Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional/Major Project dalam dokumen RKPD				10		Mencantumkan dokumen APBD dan RKPD
			1)	Tersedianya dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i> dalam Dokumen RKPD	A. Tidak Tersedia B. Tersedia	A = 0 B = 10	10	Mengukur proporsi dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPD	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
		2	Kualitas Perencanaan				58	Mengukur Kualitas Perencanaan dengan mempertimbangkan Kesesuaian antara Isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan Tingkat Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan pemda,	
		a.	Kesesuaian antara Isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD				49	Mengukur Kesesuaian antara Isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD	Mencantumkan dokumen RPJMD dan RKPD
			1)	Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah			18	Mengukur Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah	
			a)	Keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah)	A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6	6	Mengukur keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
				daerah) dengan hasil evaluasi	kurang dari 25% hasil evaluasi B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi	D = 4,8 E = 6		<i>mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
		b)	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25%	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8	6	Mengukur Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% D. Kesesuaian lebih dari 75 % dan sama dengan atau kurang dari 99% E. Kesesuaian 100%	E = 6			<i>serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>
			c)	Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis	A. Penyusunan prioritas sama dengan atau kurang dari 25% isu strategis yang telah diidentifikasi B. Penyusunan prioritas lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% isu strategis yang telah diidentifikasi C. Penyusunan prioritas lebih dari 50% dan sama dengan atau	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6	6	Mengukur keterkaitan penyusunan prioritas pembangunan dengan isu strategis	<i>Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan</i>

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
					kurang dari 75% isu strategis yang telah diidentifikasi D. Penyusunan prioritas lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% isu strategis yang telah diidentifikasi Penyusunan 100% berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi				
			2)	Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah			14	Mengukur kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			a)	Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A = 0 B = 6	6.00	Pemerintah daerah memiliki indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator					Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
			b)	Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	A. $\leq 25\%$ B. $25\% - 50\%$ C. $50\% - 75\%$ D. $\geq 75\%$	A = 2 B = 4 C = 6 D = 8	8.00	Mengukur Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			3)	Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam mencapai target dan sasaran program			17	Mengukur Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam mencapai target dan sasaran program	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			a)	Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas	A. $\leq 25\%$ B. $25\% - 50\%$ C. $50\% - 75\%$ D. $\geq 75\%$	A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375 D = 8,5	8.50	Mengukur proporsi Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	A. $\leq 25\%$ B. $25\% - 50\%$ C. $50\% - 75\%$ D. $\geq 75\%$	A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375 D = 8,5	8.50	Mengukur Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
	b.	Inovasi Perencanaan Pembangunan				9	Mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemda dalam proses Perencanaan pembangunan	Mencantumkan Dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD)
		1)	Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3	Mengukur Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		2)	Keterkaitan output dengan outcome inovasi	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3	Mengukur Keterkaitan output dengan outcome inovasi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		3)	Proporsi jumlah proyek inovasi di dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan proyek reguler	A. 0% B. 0,1% - 2% C. 2% - 4,9% D. => 5%	A = 1 B = 1,5 C = 2 D = 3	3	Mengukur proporsi Jumlah Inovasi Perencanaan Pembangunan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja					10	Mengukur keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja dilihat dari Target dan Sasaran Pembangunan	

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen
							daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	
		a.	Target dan Sasaran Pembangunan daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait			10	Mengukur Target dan Sasaran Pembangunan daerah yang menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	Mencantumkan Dokumen RPJMD, RKPD, atau dokumen lain yang sesuai
		1)	Cascading Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah			10	Mengukur Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah menggunakan metode Cascading	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		a)	Tersedianya penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas	A. Tidak Ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5	Terdapat penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		b)	Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggungjawab	A. Tidak Ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5	Mengukur/mengetahui Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggungjawab	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

C. Tahapan Pengukuran Kualitas Kebijakan

Pengukuran terhadap IPPN dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian Dokumen

Instansi yang dinilai diharapkan dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai dasar penilaian. Untuk K/L dokumen yang diperlukan adalah: (1) Renstra; (2) Renja; dan (3) RKA K/L. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah dokumen yang diperlukan adalah: (1) RPJMD; (2) RKPD; (3) Renstra OPD; dan (4) Renja OPD. Bagi instansi yang tidak menyampaikan dokumen yang diperlukan, maka tidak dilakukan penilaian terhadap dokumen terkait sehingga hasil penilaiannya menyesuaikan dengan ketersediaan dokumen yang disampaikan.

2. Pengecekan Kelengkapan Dokumen

Sebelum dimulai penilaian, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan. Apabila terdapat kekurangan, maka akan dilakukan permohonan penyampaian kembali atas dokumen-dokumen terkait.

3. Penilaian Dokumen Perencanaan

Setelah periode pengumpulan dokumen terkait, mulai dilakukan penilaian atas dokumen perencanaan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana instrumen kertas kerja yang sudah disusun tersebut. Instansi yang dinilai tidak perlu melakukan penilaian mandiri.

4. Penyampaian Hasil Penilaian

Setelah dokumen perencanaan selesai dilakukan penilaian, Kementerian PPN/Bappenas akan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada instansi terkait serta kepada Kementerian PAN dan RB sebagai salah satu komponen penilaian untuk indeks Reformasi Birokrasi (RB).

5. Diseminasi Rekomendasi Optimalisasi Dokumen Perencanaan
Pada tahapan ini, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan diseminasi kepada seluruh instansi terkait mengenai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dari dokumen perencanaan. Tahapan ini akan dilakukan dalam bentuk forum penyampaian hasil serta dalam bentuk surat untuk penyampaian rekomendasi secara spesifik kepada instansi terkait.

D. Penilaian IPPN

1. Rumus dari pengukuran IPPN yaitu jumlah total nilai dari seluruh nilai masing-masing indikator. Indikator yang dimaksud tercantum sebagaimana tertera pada Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan.
2. Penilaian IPPN kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dilakukan dalam rentang nilai dari 1-100, dengan predikat sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat
91-100	Sangat Baik
81-90	Baik
71-80	Cukup Baik
61-70	Kurang
< 60	Sangat Kurang

3. Hasil dari penilaian IPPN ini dapat menggambarkan kondisi perencanaan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam hal:
 - a. Tingkat keselarasan perencanaan di Pemerintah Pusat;
 - b. Tingkat keselarasan perencanaan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

- c. Tingkat kesesuaian penganggaran terhadap perencanaan;
- d. Kualitas dokumen perencanaan dalam menyelesaikan isu pembangunan dan mencapai prioritas pembangunan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, w

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suharso Monoarfa', with a stylized, cursive script.

SUHARSO MONOARFA